BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena politik kekerabatan menjadi salah satu dinamika yang menarik untuk dikaji. Umumnya, sistem kekerabatan secara patrilineal menjadi jaringan kekerabatan yang mendominasi kekuasaan di Indonesia. Bahkan dari sistem feodalisme hingga era reformasi, pengaruh kekerabatan patrilineal sangat dominan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal dengan politik dinasti memang kerap terjadi di sekitar kita. Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik atau pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan.

Modalitas dalam sebuah kontestasi politik dalam (Wibianto et al., 2025) merupakan hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh seorang aktor politik ketika terlibat di dalam sebuah kontestasi elektoral. Hal ini dikarenakan, modalitas politik menjadi titik awal yang berpengaruh besar dalam mempengaruhi keputusan pemilih dalam memilih seorang pemimpinnya. Dalam Kajian ini, peneliti memfokuskan pada tiga macam bentuk modalitas politik dari teorinya Pierre Bourdieu. Empat macam bentuk modalitas politik tersebut meliputi: Modal Sosial (*Social Capital*), Modal Budaya (*Cultural Capital*), *Personal Branding* dan terakhir Modal Ekonomi (*Economic Capital*).

Sistem kekerabatan secara patrilineal menjadi kekerabatan yang mendominasi kekuasaan di Indonesia. Bahkan dari sistem feodalisme hingga era

reformasi, pengaruh kekerabatan patrilineal sangat dominan dalam struktur politik Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga sangat kentara di tingkat lokal, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan Generasi Z (Gen-Z), sehingga pendekatan yang digunakan dalam mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu harus disesuaikan dengan preferensi dan karakteristik mereka. Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh KPU adalah dengan memanfaatkan platform digital dan modal sosial yang menjadi lingkungan yang akrab bagi Gen-Z. Melalui konten yang relevan dan interaktif, KPU dapat menyampaikan informasi tentang pentingnya pemilu, proses pemilihan, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih kepada mereka. (Ananda and Valentina, 2021).

Sistem kekerabatan secara Patrilineal menjadi jaringan kekerabatan yang mendominasi kekuasaan di Indonesia. Bahkan dari sistem feodalisme hingga era reformasi, pengaruh kekerabatan patrilineal sangat dominan. kapital lazimnya dimengerti hanya pada "kepemilikan ekonomi atau secara material". Kapital, semata-mata dipahami pada definisi yang terbatas, merujuk pada perihal yang material (seperti uang, komoditi, dan harta benda material lainnya). Francis Fukuyama dalam (Asrawijaya, 2022), mendefinisikan modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai- nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka.

Politik kekerabatan secara empiris menunjukkan pengaruh besar terhadap kemenangan pasangan calon kepala daerah dalam pemilu. Meskipun membuka jalan cepat bagi kerabat elit politik, praktik ini berpotensi menggerus nilai

demokrasi, menghambat regenerasi, dan melanggengkan oligarki kekuasaan di tingkat lokal. Data dari berbagai pilkada serentak menunjukkan tren yang konsisten mengenai tingkat kemenangan paslon yang berasal dari dinasti politik. Politik kekerabatan kerap dinilai sebagai sesuatu yang bisa melanggengkan kekuasaan. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal dengan politik dinasti memang kerap terjadi disekitar kita. Jadi arti dari politik kekerabatan itu sendiri adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/ pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatnya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan menurut purwaningsih dalam (Asrawijaya, 2022).

Dikutip dari Anwar (A, 2024) Terpilihnya pasangan Risky Basyah Harahap dan H. Basri Harahap dalam kontestasi politik di Padang Lawas Utara dipengaruhi oleh dua aspek utama politik kekerabatan dan integritas personal. Relasi kekerabatan juga menjadi isu yang membuat Risky Basyah terpilih menjadi Bupati Padang Lawas Utara hal ini dilihat dari *track record* keluarga harahap selama tiga periode memimpin Padang Lawas Utara. Keberhasilan kepemimpinan keluarga Harahap selama tiga periode sebelumnya (2013–2024) menjadi modal sosial yang signifikan. Hal ini diperkuat oleh persepsi publik terhadap figur Risky Basyah yang merepresentasikan nilai kejujuran, kesederhanaan, serta ketegasan dalam memimpin menjadi strategi yang cukup baik sehingga Risky Basyah dan Basri Harahap terpilih menjadi pemimpin di Padang Lawas Utara.

Secara strategis, kemenangan ini diperkuat melalui pemanfaatan modal sosial yang telah mengakar kuat di akar rumput. Strategi komunikasi politik yang dijalankan berfokus pada penguatan persepsi publik terhadap figur Risky Basyah

yang merepresentasikan nilai kejujuran, kesederhanaan, serta ketegasan. Penonjolan atribut personal ini menjadi strategi jitu untuk menciptakan "kontinuitas yang inovatif", di mana masyarakat tidak hanya memilih berdasarkan faktor keturunan (*aspek ascriptive*), tetapi juga karena merasa yakin pada kompetensi kepemimpinan individu tersebut. Kombinasi antara struktur kekuatan keluarga yang solid dan *personal branding* yang menyentuh sisi psikologis masyarakat inilah yang menjadi determinan utama terpilihnya Risky Basyah dan H. Basri Harahap di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Konsep modal dalam konteks politik antara lain dikemukakan oleh Birner dan Witmer dalam (Ananda and Valentina, 2021) . Birner dan Witmer menjadikan konsep modal politik yang memungkinkan untuk mengkaji masyarakat lokal menggunakan modal sosial untuk mencapai sasaran hasil politik. Berbagai kerja politik dilakukan oleh masyarakat lokal untuk mendukung kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi, protes/demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk membangun demokrasi.

Personal branding dalam kontestasi pemilihan merupakan upaya sistematis untuk membangun persepsi publik yang membedakan seorang kandidat dari kompetitornya. Melalui konsistensi pesan, gaya berpakaian, hingga cara berinteraksi dengan masyarakat, seorang calon berupaya menciptakan citra sebagai sosok yang kompeten dan dapat dipercaya. Dalam konteks lokal, strategi ini sering kali difokuskan pada nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan konstituen, seperti atribut "merakyat" atau "jujur". Keberhasilan membangun merek diri ini tidak hanya meningkatkan popularitas (akseptabilitas), tetapi juga membangun loyalitas pemilih yang merasa memiliki kesamaan identitas dengan figur tersebut.

Kharisma bekerja sebagai katalisator emosional yang memperkuat daya tarik personal kandidat di mata pemilih. Kharisma bukanlah sekadar daya tarik fisik, melainkan kemampuan seorang pemimpin untuk memancarkan keyakinan, ketegasan, dan visi yang mampu menggerakkan massa secara psikologis. Dalam pemilihan bupati, kandidat yang memiliki kharisma kuat cenderung lebih mudah mendapatkan legitimasi sosiopolitik tanpa harus selalu bergantung pada politik transaksionalitas. Perpaduan antara citra diri yang terencana secara profesional dan aura kepemimpinan yang autentik menciptakan resonansi kepercayaan yang mendalam, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa kandidat tersebut adalah solusi atas permasalahan di daerah mereka (Raihan, 2023).

Berangkat dari beberapa studi sebelumnya yang telah dilakukan baik di Indonesia maupun di Asia, dapat dijadikan landasan untuk menganalisis fenomena politik kekerabatan yang terjadi serta dampak dari politik kekerabatan terhadap partai politik. Hal itu tanpa alasan, sebab ada pula yang memanfaatkan politik kekerabatan untuk mendapatkan dukungan elektoral di semua lini.(Arianto, 2021).

Politik kekerabatan merupakan suatu serangkaian strategi manusia yang bertujuan memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Biasanya dalam suatu lembaga politik, pola yang mempunyai hubungan keluarga seringkali mendapatkan keistimewaan untuk menempati berbagai posisi penting dalam puncak hirarki kelembagaan organisasi (Arianto, 2021).

Politik kekerabatan secara empiris menunjukkan pengaruh besar terhadap kemenangan paslon kepala daerah dalam pemilu. Meskipun membuka jalan cepat

bagi kerabat elite politik, praktik ini berpotensi menggerus nilai demokrasi, menghambat regenerasi, dan melanggengkan oligarki kekuasaan di tingkat lokal.

Tabel 1. 1
Kemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2013-2024

Tahun Pemilihan	Pasangan calon terpilih (Bupati-Wakil Bupati)	Jumlah Suara
2013	Drs. H. Bachrum Harahap & H. Riskon Hasibuan	78.106 %
2018	Andar Amin Harahap, S.STP,M.Si & H. Hariro Harahap, E, M.Si	86.915 %
2024	Resky Basyah Harahap, S.STP,M.Si & H. Basri Harahap	59.734 %

Praktek dinasti politik juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah salah satunya pada tahun 2020. Pilkada serentak Jawa Tengah tahun 2020 digelar 9 Desember 2020 di 21 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Klaten, Pemalang, Blora, Rembang, Purwoejo, Wonogiri, Kendal, Demak, Semarang, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Grobogan, Kebumen, Boyolali, Sragen serta Kota Surakarta, Magelang, Semarang dan Pekalongan (Riyanto et al., 2024)

Praktek dinasti politik yang berlangsung pada pilkada serentak Jateng 2020 setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor kelembagaan terkait dengan keputusan MK No.33/PUU/XIII/2015 yang membatalkan regulasi terkait pembatasan atau pengaturan praktek dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. Keputusan MK tersebut telah melegitimasi terbukanya praktek dinasti politik dalam kontestasi pilkada serentak di Indonesia. Imbasnya kepala daerah yang sedang berkuasa dan memiliki naluri kekuasaan untuk mempertahankan status *quo* akan berusaha mewariskan kekuasaannya kepada kerabatnya baik istri, suami atau anak. (Riyanto et al., 2024).

Praktek dinasti politik yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah salah satunya pada tahun 2020. Pilkada serentak Jawa Tengah tahun 2020 digelar 9 Desember 2020 di 21 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Klaten, Pemalang, Blora, Rembang,Purworejo,Wonogiri,Kendal,Demak,Semarang, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Grobogan, Kebumen, Boyolali, Sragen serta Kota Surakarta, Magelang, Semarang dan Pekalongan (Riyanto et al., 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang, adapun permasalahan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana modalitas politik kekerabatan dalam kemenangan Risky Basyah Harahap dan H. Basri Harahap pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah: Modalitas politik kekerabatan seperti apa yang digunakan pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa efektif modalitas politik kekerabatan pasangan calon dalam meningkatkan strategi kemenangan pemilihan umum.

1.5 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengetahui bagaimana strategi dan efektifitas modalitas politik kekerabatan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan materi perkuliahan bagi mahasiswa terutama dari ruang lingkup Universitas Malikussaleh, serta menjadi bahan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki dua manfaat antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana sebuah modalitas politik kekerabatan dapat mengetahui sebuah pasangan calon dalam pemilu.
2. Agar dapat membagi hasil penelitian ini kepada mahasiswa/i maupun aktor politik bisa memberikan informasi dan pengetahuan.